

BAB V PENGEMBANGAN MODEL

A. Pengembangan Model Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Pendidikan Lokal Tingkat Sekolah Dasar di Kota Surabaya

1. Pengembangan Konsep Model

a. Materi

Materi Utama

Sumber materi utama pengembangan konsep model pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya dirujuk dari temuan hasil pembahasan interrelasi antara budaya pendidikan lokal (BPL) tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya, dengan hasil evaluasi uji-coba pendidikan inklusif (UcPI) yang dilaksanakan oleh Balitbang Diknas di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari DI Jogjakarta, serta hasil kajian konseptual pendidikan inklusif (KPI). Temuan hasil pembahasan interrelasi BPL, UcPI dan KPI tersaji pada tabel 13.

Materi Pendukung

- 1) Temuan data tentang budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya.
- 2) Temuan data tentang hasil evaluasi uji-coba pendidikan inklusif yang dilakukan Balitbang Diknas di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari DI. Jogjakarta.
- 3) Temuan data hasil kajian konseptual pendidikan inklusif.

4) Rumusan Elemen-Elemen Dasar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Pendidikan Lokal (E2DPiB2PL)

b. Strategi pengembangan konsepmodel

Secara umum struktur maupun materi konsepmodel dikembangkan dari hasil pembahasan interrelasi BPL, UcPI dan KPI. Alur pengembangan konsepmodel tervisualisasikan pada gambar 4 (halaman 126). Rambu-rambu pengembangan konsepmodel seperti tertuang pada gambar tersebut adalah sebagai berikut:

- Area I – 3 menggambarkan posisi indikator yang memiliki interrelasi dengan ketiga komponen (BPL, UcPI dan KPI). Indikator-indikator yang terjaring dalam area I – 3 ini, secara langsung dapat diadopsi sebagai materi pengembangan model.
- Area I – 2 menggambarkan posisi indikator yang hanya memiliki dua interrelasi, peluang interrelasinya (antara, BPL-UcPI, BPL-KPI, UcPI-BPL, UcPI-KPI, KPI-BPL, dan KPI-UcPI). Indikator-indikator yang terjaring dalam area I – 2 ini, pada dasarnya dapat diadopsi sebagai materi pengembangan model, tetapi harus melalui pertimbangan penyesuaian terlebih dahulu.
- Area I – 0 menggambarkan posisi indikator-indikator yang tidak memiliki interrelasi dengan kedua kelompok lainnya. indikator-indikator yang terjaring dalam area I – 0 ini, setelah melalui pertimbangan fisibilitas, kemungkinan alternatifnya adalah; **pertama** dapat dipergunakan sebagai materi pendukung

pengembangan model; *kedua* diabaikan dan akan berfungsi sebagai kontrol terhadap eksistensi model.

c. Rumusan Konsep Model

Kerangka isi model adalah sebagai berikut: (1) Definisi operasional; (2) Elemen-elemen dasar dan prinsip-prinsip pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal; (3) Landasan filosofis; (4) Visi-misi; (5) Tujuan; (6) Sasaran (7) Manajemen; (8) Pola pengelolaan kelas; (9) Kurikulum; (10) Pengelolaan pembelajaran; (11) Sistem evaluasi dan kenaikan kelas; (12) Prasarana dan sarana; (13) Tenaga kependidikan, tugas dan kedudukannya; (14) Struktur Organisasi; dan (15) Pemberdayaan masyarakat.

Konsepmodel selengkapnya tersaji pada lampiran 8.

2. Validasi Konsep Model

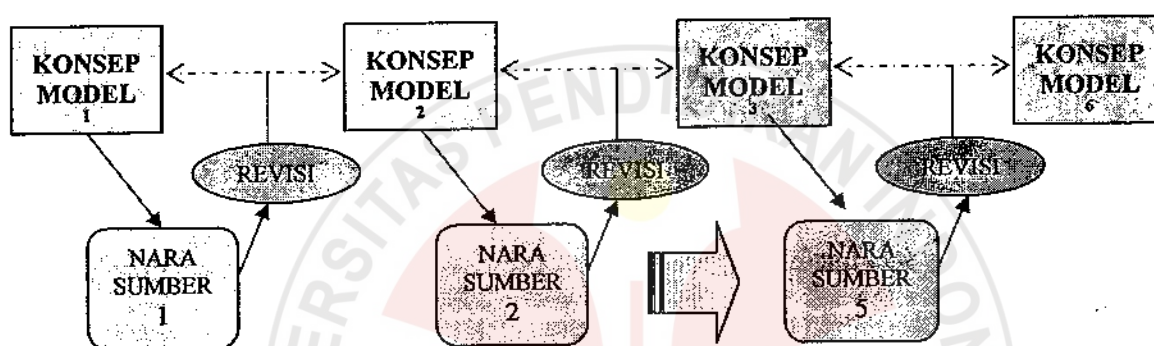
Kegiatan validasi dimaksudkan untuk menemukan kelayakan model yang telah dirumuskan. Kegiatan validasi dilakukan 2 tahap:

Validasi tahap pertama

Dilakukan secara berkelanjutan, dengan cara: konsepmodel dimintakan masukan pada nara sumber pertama, selanjutnya atas masukan tersebut direvisi. Kemudian hasil revisi dari nara sumber pertama dimintakan masukan pada nara sumber kedua, selanjutnya atas masukan nara sumber kedua konsepmodel direvisi lagi. Begitu selanjutnya sampai mendapat masukan dari 5 nara sumber. Nara sumber yang

dimintai masukan tersebut adalah: (1) Dadang P. S.Pd., guru, SD N rintisan inklusi; (2) Tutik Darwati S.Pd., Guru SLB-A, B, C dan D; (3) Drs. Muji Raharjo, Kepala SLB-A pengembang sekolah terpadu; (4) Wagino M.Pd., Dosen PLB UNESA. Dan (5) Drs. Drs. Sujarwanto M.Pd. anggota Instruktur Nasional Pendidikan Inklusi Dir. PLB Jakarta.

Skema alur validasi konsepmodel tahap pertama ini tersaji pada gambar berikut:



GAMBAR 16
SKEMA SISTEM VALIDASI TAHAP PERTAMA

Validasi tahap kedua

Target validasi tahap kedua adalah untuk mengetahui kelayakan model setelah melalui serangkaian validasi pada tahap pertama. Validasi ini dilaksanakan diskusi yang dilaksanakan pada tanggal, 2 Mei 2005, dengan melibatkan beberapa tokoh pendidikan dasar di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Nara sumber yang bertindak sebagai validator yaitu: (1) Drs. Achmad DS., figur tokoh pendidikan yang pernah menduduki

jabatan strategis kependidikan dari Babid di Kanwil Dikbud Prop. Jatim, Kakanwil Depdikbud DIJ, Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Jakarta; (2) Drs. Timan Hadisutjipto, Pengawas PLB Kanwil Prop Jatim; (3) Drs. Matadjid, Ketua PGRI Jawa Timur; (4) Drs. Idris Ahmad, M.Pd. sekretaris Program PLB UNESA; (5) Drs. H. Moch Talkah, MA., mantan Ketua Program PLB UNESA, juga sebagai tokoh PLB di Jawa Timur; (6) Dra. Hj. Sukarlik, M.Si, kepala sekolah rintisan inklusi SD Klampis Ngasem I; (7) Dra. Hj. Endang Ariadi Suwarno, M.Pd., Kepala sekolah rintisan inklusi SD Lab. UNESA; (8) Dra Yayuk, guru SLB-B TRW; (9) M Sholeh Azis, Guru SD Yamasto; (10) Mashuri, Orang tua siswa; dan (11) Ny. Hariyono, Orang tua siswa.

Alur kegiatan validasi tahap kedua ini sebagai berikut: (1) konsepmodel disampaikan pada seluruh validator lima hari sebelum diskusi dilaksanakan, agar validator memiliki cukup waktu untuk memberikan masukan. Guna mempermudah validator dalam memberikan masukan. di setiap lembar konsep model disediakan ruang untuk memberikan masukan perbaikannya; (2) kegiatan pada waktu diskusi diawali dengan penjelasan peneliti tentang konseptual dan diskripsi model. Selanjutnya masing-masing validator diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap konsep model yang telah dipelajari sebelumnya. Di tengah diskusi berlangsung terhadap pokok masalah tertentu antar validator saling memberikan masukan; (3) pencatatan hasil diskusi, kegiatan diskusi terdokumentasikan dalam bentuk rekaman

digital dan catatan pada masing-masing konsep yang telah dituliskan oleh masing-masing validator.

3. Rangkuman masukan validator

Masukan dari 11 validator yang sebagian besar juga telah memberikan informasi pada tahap pengumpulan data, menyatakan bahwa secara umum konsep model yang sudah dikembangkan layak dipergunakan sebagai acuan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal di Kota Surabaya. Meskipun demikian pada saat diskusi validator menyarankan dilengkapi dengan rencana aksinya (*Plan of action*) dari program ini.

Lebih lanjut validator juga memberikan masukan penyempurnaan model yang telah dirumuskan, baik yang berkaitan dengan konsep isi, redaksi, sistematika, maupun tata tulisnya. Rangkuman masukan tersebut tertuang pada tabel berikut:

TABEL 13
RANGKUMAN MASUKAN VALIDATOR

No.	Validator	Masukan
1.	Drs. H. Achmad DS	Setelah saya membaca hasil analisis ini (prinsip-prinsip pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal), ternyata telah dipadukan antara temuan konseptual pendidikan inklusif dengan budaya pendidikan lokal dan disesuaikan dengan hasil uji-coba Balitbang di wanasari, saya dapat memahami alur piker model ini sekalipun belum diuji-cobakan. Saran saya tolong dirumuskan sekalian kira-kira kerangka aksinya, siapa tahu nanti Dinas Pendidikan dapat mendanai untuk

		<p>implementasinya.</p> <p>Untuk menyempurnakan ini saya masih ada masukan yang sudah saya coret-coret di konsepmodel yang telah saya baca.</p> <p>Diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tolong dijaga konsistensi penggunaan istilah-istilah, seperti guru khusus, guru pendidikan khusus, dan guru pembimbing khusus. Hemat saya guru yang saudara maksud itu bukan sekedar pembimbing khusus, tetapi memang guru pendidikan khusus. Karena latar belakangnya kan pendidikan luar biasa, bukan guru pembimbing. - Untuk pengelolaan kelas/penempatan ABK pemahaman yang gampang itu kan yang berat biar saja pada sekolah khusus atau kalau di sekolah reguler tetap pada kelas khusus, sedangkan yang sedang itu kan bisa diintegrasikan sekalipun mungkin hanya sebagian, nah kalau yang ringan kayaknya tidak masalah kalaupun disatukan penuh asal ada pendidikan khususnya. - Tentang guru terhadap perbedaan anak, itu tidak cukup hanya memahami perbedaan itu, tetapi juga menerima yang dinyatakan dalam bentuk tindakan. - Tentang pemberdayaan masyarakat, tolong peran komite sekolah itu juga dilibatkan, atau lembaga masyarakat juga. - Dalam menyebut pendidikan dasar diperjelas, yang dimaksud SD atau wajar dikdas yang isinya tingkat SD dan SMP. - Dalam pengetikan saya temukan masih terdapat beberapa kekeliruan, sekalipun ini hanya kesalahan dalam pengetikan, tapi bagi pembaca pemafsiran maknanya bisa menjadi berbeda.
2.	Drs. Timan HS	<p>Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, karena apa yang dulu sudah saya sampaikan besarnya sudah terkaver. Tetapi saya justru saya berfikir pada aspek manajemen, saya tahu pola manajemen yang demokratis itu lebih baik, tetapi contoh-contoh yayasan PLB yang berhasil itu cenderung ada unsur otoriter, atau mungkin factor kedisiplinannya. Bila betul</p>

		<p>demikian maka factor kedisiplinan itu juga diberi porsi yang cukup.</p> <p>Lalu tentang guru PLB yang membantu sekolah reguler, sebaiknya tidak setengah-setengah. Kalau memang dibutuhkan di sekolah reguler ya sekalian kepegawaiannya dimutasikan sekalian. Sebab kalau punya atasan dua pengalaman tidak menguntungkan. Atau sekalian saja mengangkat guru PLB yang baru dan ditempatkan di sekolah reguler.</p> <p>Saya juga sependapat dengan Bapak Ahmad tadi, bahwa pengelolaan kelas sepertinya bagi anak luar biasa yang berat, terlalu berat juga kalau harus disatukan dengan anak-anak yang normal, baik bagi gurunya maupun bagi anak itu sendiri.</p>
3.	Drs. Matadjid	<p>Terus terang, saya kurang memahami benar tentang anak luar biasa. Saya justru berterimakasih ada penelitian seperti ini. Tetapi hemat saya masalah religius bagi kita sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Saya lihat di elemen-elemen dasar itu sudah tercantum, tetapi sebaiknya posisinya dipertegas.</p> <p>Tentang budaya pendidikan kita dari dulu yang namanya gotong-royong itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah, tetapi sekarang ini menjadi kurang diperhatikan. Menurut saya ini harus dimasukkan, entah dimana posisinya.</p>
4.	Drs. Idris Achmad	<p>Secara umum saya menyatakan model ini dapat menjawab keraguan dalam dunia pendidikan karena disana-sini yang saya jumpai itu adalah menguji-cobakan konsep atau model dari luar. Atas ketertarikan saya itu maka Saya akan berusaha melihat satu persatu;</p> <p>Tentang definisi operasional, bila dipandang perlu ditambah tentang definisi pendidikan inklusif itu sendiri.</p> <p>Tentang elemen-elemen dan prinsip-prinsip, itu adalah hak Bapak (peneliti), karena telah melalui proses yang panjang untuk mendapatkan itu.</p> <p>Tentang visi dan misi, tolong dari redaksional</p>

		<p>dapat disempurnakan. Kalau konten sudah oke.</p> <p>Tentang tujuan, aspek yang berkaitan dengan peningkatan potensi anak belum ditinjau secara spesifik. Kalau perlu dalam tujuan khusus menjadi butir tersendiri. Saya pikir ini penting.</p> <p>Tentang sasaran, saya kira tidak ada masalah.</p> <p>Tentang manajemen, saya kira sudah oke juga</p> <p>Tentang pola penempatan kelas, saya kira konsep ini sudah tepat sesuai dengan harapan masyarakat, atau budaya pendidikan, tetapi tidak ada salahnya bila dimintakan masukan ulang dari seluruh peserta diskusi ini. Karena ini masalah yang rawan.</p> <p>Tentang kurikulum, ini sudah bagus karena sudah memadukan antara KBK dengan IEP. Khusus untuk IEP aspek asesmen tolong posisinya dipertegas, karena kata kuncinya di sini sementara dalam KBK yang saya ikuti selama ini belum menyentuh sampai disana, padahal seharusnya sampai disana.</p> <p>Tentang KBM, ini juga sejalan dengan kurikulumnya. Tetapi saya tambahkan masalah penyesuaian terhadap gaya belajar anak itu harus diprioritaskan.</p> <p>Tentang evaluasi dan kenaikan kelas, untuk yang ini juga harus hati-hati, karena idealnya dalam pendidikan inklusif dengan kenyataan pemahaman masyarakat pendidikan saja masih banyak kontroversi. Persepsi masyarakat itu telah mengakar, artinya telah menjadi budaya, sementara konsep ideal dalam pendidikan inklusif itu adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Oleh sebab itu menurut hemat saya kita harus berangkat dari budayanya dulu menuju ke yang ideal, biar perubahannya itu halus. Tentang redaksionalnya itu urusan peneliti.</p> <p>Tentang sarana dan prasarana, saya kira tidak ada masalah, tanpa harus ada alat yang seperti itu sebenarnya juga dapat berjalan, sebaiknya kita tidak membuat momok melalui alat-alat pendidikan khusus.</p> <p>Tentang tenaga kependidikan, berkenaan dengan kedudukan dan pembinaan, sebaiknya</p>
--	--	---

		<p>pada posisi ini jangan mengajukan alternatif lagi, tetapi yang tegas, berdasarkan penelitian untuk Suarabaya yang paling cocok atau resikonya paling rendah yang mana.</p> <p>Tentang struktur organisasi, ini kasusnya juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu jangan ajukan alternatif, tetapi tentukan mana yang paling cocok.</p> <p>Tentang pemberdayaan masyarakat, saya piker sudah komprehensif.</p> <p>Terakhir saya merasa senang mendapatkan kesempatan ini, terimakasih.</p>
5.	Drs. H. M. Talkah MA	<p>Saya juga setuju dengan pendapat Pak Ahmad tadi, secara umum model yang dikembangkan ini sudah komprehensif. Saya ingin membahas yang berkenaan dengan filosofis, kalau konsep dasar filosofis sudah masuk pada elemen-elemen dasar, maka filosofis tidak perlu dibahas lagi. Tetapi bila belum terhaber harus dibahas tersendiri.</p> <p>Tentang pembelajaran, saya ini lama mengajar tentang pembelajaran dengan pendekatan IEP dan IEP sendiri sudah lama dipergunakan dalam pendidikan luar biasa. Nah sekarang ini muncul kurikulum berbasis kompetensi (KBK) khususnya pada sekolah reguler yang implementasinya juga pendekatan kompetensi. Keduanya itu konsep pikirnya sejalan. Oleh sebab itu kedua pendekatan ini dipadukan. Kata kunci asesmen harus tetap dipergunakan termasuk dalam KBK.</p> <p>Tentang kenaikan kelas, ini perlu waspada. Sebab bagaimanapun juga persepsi masyarakat yang namanya perbedaan kelas itu berarti berbeda pula kemampuannya, termasuk dalam penguasaan akademiknya. Nah sekarang kalau konsep itu belum dapat diterapkan secara utuh ya dimulai dari sebagian dulu yang sesuai dengan budaya/pemahaman masyarakat. Sebab yang namanya mengubah persepsi masyarakat itu tidak gampang.</p>
6.	Dra. Hj Sukarlik M.Si	<p>Sesuai dengan pengalaman saya setelah merintis penyatuan ABK pada sekolah reguler,</p>

		<p>rumusan model seperti ini yang saya tunggu-tunggu. Sebab selama ini saya berjalan seadanya saja.</p> <p>Kalau boleh saya berpendapat, terus terang-Pak, orangtua maupun anak-anak itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman Saya, mereka itu lebih senang dengan model sekolah semacam ini. Kalau di SLB itu katanya malu, baik orangtuanya maupun anak-anaknya itu sendiri. Selain itu bagi Saya kalau anak-anak itu sudah senang dengan sekolahnya maka mendidiknya akan lebih mudah. Begitu pula dengan orangtuanya kalau mereka itu sudah senang dengan sekolahnya, maka mereka itu dilibatkan dalam kegiatan apapun mereka itu pasti mau dan sepenuh hati melaksanakannya.</p> <p>Apa yang saya katakan tadi maksudnya bahwa dalam pembelajaran prinsip kesenangan, ketenangan itu penting. Tentang kerjasama dengan lembaga yang lebih luas, prinsip butir berapa itu. Saya sangat setuju sekali, soalnya saya sekarang ini sudah merasakan. Kadang-kadang saya tidak nyangka kalau dapat kerjasama dengan S-2 psikologi UNAIR, dengan UNESA, dengan dinas kesehatan, dan bahkan dengan luar negeri. Bahkan saya juga sering dipanggil ke mana-mana. Kalau saya hanya menekuni anak-anak reguler tentu saja hal itu tidak akan pernah terjadi,</p>
7.	Dra. Hj. Endang Ariadi Suwarno M.Pd	<p>Di sekolah saya beberapa tahun terakhir ini memang telah menerima anak berkebutuhan khusus. Tetapi bukan karena ada instruksi, atau apapun dari manapun, saya hanya berfikir bahwa sebenarnya apa yang diperlukan anak dalam pendidikan itu sama, hanya mungkin mereka (anak berkelainan) memerlukan sedikit pendekatan yang khusus agar kebutuhan pendidikannya itu dapat terpenuhi. Dalam konteks integrasi di sekolah reguler, Saya pikir kebutuhan pendidikan bagi semua anak itu hakekatnya sama, tetapi lantaran mereka memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi, pemahaman, maupun mobilitas,</p>

		<p>maka mereka memerlukan sedikit pendekatan khusus agar dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler.</p> <p>Mungkin apa yang saya lakukan selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan model ini, tetapi setelah saya cermati wawasan yang saya pikirkan sebagian besar sudah ada pada model ini. Sekarang sebenarnya justru saya yang lebih banyak menarik manfaat dari model ini. Tetapi yang saya sarankan sebaiknya sistematika penulisannya yang konsisten dan pengetikannya perlu lebih cermat lagi.</p>
8.	Dra Yayuk	<p>Saya telah beberapa kali menyiapkan agar anak-anak tunarungu yang saya didik itu dapat sekolah di SD biasa. Tetapi kenyataannya mereka yang dapat mengikuti pendidikan di SD biasa dengan baik itu adalah mereka yang memiliki kecerdasan baik dan orangtuanya benar-benar mendukungnya luar dalam. Oleh sebab itu saya setuju kalau dalam penempatan kelas juga dipertimbangkan factor tingkat kecerdasan anak atau berat ringannya kelainan anak.</p> <p>Disamping itu bagi anak tunarungu tidak serta merta dapat diintegrasikan, sebab perlu persiapan khusus, yang biasanya saya siapkan antara lain kecakapan komunikasi, kecakapan belajar dan kesiapan mental.</p>
9.	M Sholeh Azis	<p>Selaku guru SD reguler yang sedang belajar mendalami tentang pendidikan inklusif, saya kira model ini sudah dapat dipergunakan sebagai pedoman, yang jelas saya dapat memahaminya. Kalau suruh mengkritik atau masukan, saya ikut saja dengan pendapat yang lain itu. Ohya tentang sistem kenaikan kelas, ini kalau tidak ada patokan penguasaan di tiap kelasnya bisa susah.</p>
10.	Mashuri	<p>Kalau saya tidak dapat menilai karena memang tidak tahu banyak tentang kependidikan, tetapi yang saya mau diskripsi peran orangtua yang konkrit itu seperti apa. Sehingga saya dapat memperlajarnya agar</p>

		dapat nimbrung (turut memikirkan) tentang pendidikan inklusi yang sangat saya harapkan ini.
11.	Ny. Haryono	Anak Saya sekarang ini sudah duduk di kelas IV pada kelas reguler, perjalanan sampai kelas IV itu saya benar-benar mencurahkan waktu dan perhatian sepenuhnya. Hubungannya dengan model ini saya akan katakana bahwa untuk sekolah inklusif, peran orangtua itu sangat menentukan. Tentang yang lain saya tidak tahu, tetapi ini kalau benar-benar dilaksanakan saya selaku orangtua sangat senang.

4. Revisi Konsep Model

Melalui kegiatan validasi tahap kedua diperoleh justifikasi tentang kelayakan konsepmodel Yang telah dikembangkan. Disamping itu juga diperoleh masukan akhir untuk penyempurnaan model. Berdasarkan masukan hasil validasi tahap kedua ini konsepmodel direvisi agar diperoleh model akhir pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan local tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya.

5. Rumusan Model Akhir

MODEL PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA PENDIDIKAN LOKAL TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA SURABAYA

A. Definisi Operasional

- Pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal adalah layanan pendidikan bagi semua anak, baik anak "normal" maupun anak berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler yang disesuaikan dengan budaya pendidikan lokal.
- Sekolah dasar inklusif berbasis budaya pendidikan lokal adalah sekolah dasar reguler, negeri maupun swasta yang melaksanakan pendidikan inklusif sesuai dengan kondisi budaya pendidikan lokal.
- Peserta didik adalah anak-anak usia sekolah baik yang tergolong "normal" maupun anak berkebutuhan khusus, dari latar belakang sosial manapun.
- Budaya pendidikan lokal adalah kebiasaan-kebiasaan, keyakinan dan pola pikir yang telah terpolakan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya tingkat pendidikan dasar (sekolah dasar) di kota Surabaya

A. Landasan Filosofis


1. Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, oleh sebab itu mereka harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar,
2. Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda,

3. Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan anak,
4. Mereka yang menyangang kebutuhan pendidikan khusus hendaknya memperoleh akses ke sekolah reguler yang dapat mengakomodasi mereka dalam kerangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya,
5. Sekolah reguler dengan orientasi inklusi merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua; lebih jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan.
6. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tanggungjawab bersama antara orangtua, masyarakat dan pemerintah, yang disesuaikan dengan budaya setempat.

C. Elemen-Elemen Dasar dan Prinsip-Prinsip Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Pendidikan Lokal

a. Elemen-elemen dasar pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal

- (1) Komitmen terhadap norma-norma religius; keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

- 
- (2) Komitmen terhadap nilai-nilai moral; menghargai kebenaran, berakhlak mulia, sopan santun, jujur, bertanggung jawab, dan tenggang rasa.
 - (3) Komitmen terhadap nilai-nilai sosial; gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, dan persaudaraan
 - (4) Komitmen terhadap Perdamaian; Cinta, Keharuan, Harmoni, Toleransi, Mengasuh dan berbagi, Independensi, Pengenalan jiwa orang lain, dan Perasaan berterimakasih.
 - (5) Komitmen terhadap Hak-asasi manusia meliputi; Kebenaran, Kesamaan dan keadilan, Penghormatan atas martabat manusia, Integritas, Akuntabilitas, Kesiapan menerima, Penghargaan atas kemajemukan, Kebebasan dan tanggung jawab, dan Kerja sama.
 - (6) Demokrasi; Penghormatan atas hukum dan ketertiban, Kebebasan dan tanggung jawab, Kesamaan, Disiplin diri, Kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab, Keterbukaan, Berpikir kritis, dan Solidaritas
 - (7) Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan; Kesangkilan atau efisiensi, Orientasi masa depan, Memperhatikan lingkungan, Pengurus sumber daya, Kreativitas, Kehormatan, Kesederhanaan, Ekologi pribadi.
 - (8) Komitmen terhadap pendekatan pendidikan yang holistik
 - (9) Komitmen terhadap filsafat pendidikan yang berpusat pada anak (*child-centered*)

- (10) Komitmen terhadap sistem pembelajaran yang adaptif dan fleksibel terhadap kebutuhan khusus peserta didik.
- (11) Komitmen terhadap sistem pengembangan kompetensi akademik yang seimbang dengan kompetensi sosial,
- (12) Komitmen terhadap sistem layanan yang bersifat komunikatif, konsultatif, kolaboratif, dan keterbukaan (*communicative, collaborative, and consultation, and transparency*).
- (13) Komitmen untuk berbagi tanggung jawab dengan masyarakat (*community shared responsibility*).
- (14) Komitmen untuk berbagi tanggung jawab dengan keluarga.
- (15) Komitmen terhadap sistem pendidikan yang seimbang antara lmtaq dan lptek.
- (16) Komitmen terhadap pemerataan kesempatan belajar, melalui program wajib belajar pendidikan dasar
- (17) Komitmen Terhadap Kedisiplinan, meliputi: patuh, tertip, dan teratur, konsisten.

2. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dasar yang lebih baik
- (2) Setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan pada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya
- (3) Setiap anak memiliki potensi, bakat, dan irama perkembangan masing-masing yang harus diberikan layanan secara tepat
- (4) Pendekatan pembelajaran bersifat fleksibel, kooperatif dan berdayaguna
- (5) Sekolah adalah bagian integral dari masyarakat)
- (6) Dalam pembelajaran sekolah berkolaborasi dengan professional lain yang terkait

- (7) Sekolah responsive terhadap kebutuhan khusus semua anak sesuai dengan tingkat kesiapan SDM serta sarana dan prasarananya
- (8) Sekolah berkewajiban mengembangkan potensi anak secara optimal
- (9) Kurikulum berbasis kompetensi yang adaptif dan fleksibel
- (10) Penekanan pada pemerataan dan peningkatan kualitas
- (11) Penekanan pada etos keberhasilan untuk menggantikan sindrom kegagalan
- (12) Penekanan pada pendekatan pembelajaran yang lebih humanis, demokratis, kooperatif dan kolaboratif serta disiplin bagi semua anak
- (13) Bagi anak yang telah memiliki kecakapan komunikasi sosial dan edukatif memadai duduk dalam kelas yang sama dengan teman seusianya
- (14) Sistem kenaikan kelas terjadi secara alami dengan mempertimbangkan aspek usia dan kematangan sosialpsikologis anak
- (15) Siswa belajar sesuai dengan potensi kemampuannya dari silabi/kurikulum yang telah ada
- (16) Siswa belajar mengembangkan sikap toleran sesuai dengan tatakrma yang berlaku di lingkkungannya
- (17) Siswa belajar menumbuhkan sikap percaya diri
- (18) Siswa belajar menghargai eksistensi pribadi
- (19) Siswa dibiasakan berkerjasama dengan teman sendiri
- (20) Siswa merasa menjadi bagian dari kelas dan menganggap kelas sebagai milik bersama
- (21) siswa memiliki pengalaman berhasil

- (22) Siswa belajar menemukan dan menerima kelebihan serta kekurangan diri secara alami
- (23) Guru mempertimbangkan perbedaan antar siswa dalam kelasnya
- (24) Guru menyiapkan tugas-tugas yang berbeda untuk siswa-siswanya
- (25) Guru berkolaborasi dengan tenaga ahli lain secara intensif dalam melaksanakan tugasnya
- (26) Guru mengembangkan komunikasi interpersonal dengan siswa
- (27) Guru mendorong terjadinya interaksi promotif antar siswa
- (28) Guru memperhatikan dan menyesuaikan cara/gaya belajar siswa
- (29) Guru melibatkan orangtua dalam pembelajaran
- (30) Guru menjadikan sekolah menarik bagi siswa
- (31) Guru membuat siswa aktif dan tekun
- (32) Guru aktif, kreatif, fleksibel dan disiplin
- (33) Guru reguler dan guru khusus saling berbagi pengalaman
- (34) Kepala sekolah berkolaborasi dengan lembaga lain yang lebih luas
- (35) Kepala sekolah memotivasi guru agar selalu belajar meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya
- (36) Kepala sekolah terlibat aktif dalam kegiatan sosial setempat
- (37) Kepala sekolah mengkondisikan terjadinya iklim sekolah yang ramah bagi semua
- (38) Kepala sekolah mengoptimalkan peran orangtua terhadap sekolah

D. Visi dan Misi

b. Visi

Menjadikan sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal yang ramah bagi semua dan mampu mengembangkan potensi semua peserta didik secara optimal dan terintegrasi, dengan memperhatikan

indikator nilai-nilai moral universal, religius, perdamaian, hak asasi, demokratisasi, pembangunan berkelanjutan dan budaya pendidikan lokal.

c. Misi

Menyelenggarakan pendidikan dasar yang ramah bagi semua peserta didik secara terintegrasi sesuai dengan kekhususan kebutuhan peserta didik.

E. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua anak usia sekolah, agar dapat memperoleh pendidikan dasar di sekolah yang diinginkan yang terdapat di lingkungan sekitarnya.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar.
- b. Meningkatkan perolehan hasil belajar bagi semua peserta didik.
- c. Meningkatkan pemberdayaan potensi nilai-nilai budaya pendidikan lokal dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan.
- d. Meningkatkan peran para tenaga professional yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar.

- e. Meningkatkan peran tiga komponen utama pendidikan (orangtua, masyarakat dan pemerintah) dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar.
- f. Meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka drop-out.

F. Sasaran

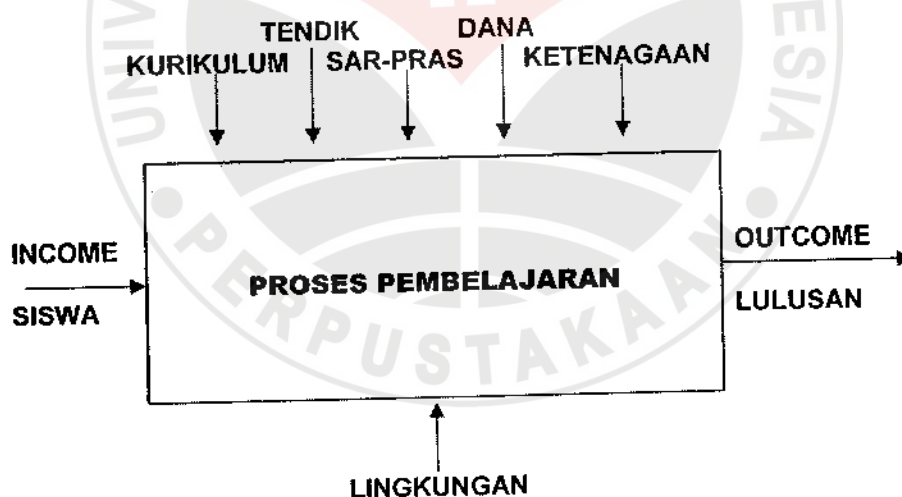
Sasaran pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal tingkat sekolah dasar adalah semua anak usia sekolah 7 – 12 tahun, baik yang tergolong “normal” maupun berkebutuhan khusus tanpa membedakan latar belakang agama, status sosial, etnik, ras maupun suku bangsanya.

G. Manajemen

Manajemen sekolah inklusif adalah upaya pendayagunaan sumber-sumber material maupun personal di sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Representasi sumber-sumber material maupun personal persekolahan secara internal meliputi; sarana dan prasaran, kurikulum, tenaga pendidik, dana dan ketenagaan. Lingkungan juga dapat dipandang sebagai Instrumen pendidikan yang sekaligus merepresentasikan tuntutan terhadap luaran pendidikan. Instrumen-instrumen tersebut perlu diberdayakan seoptimal mungkin dengan memperhatikan nilai-nilai budaya pendidikan lokal agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sejalan dengan karakter sekolah

inklusif dan instrumentasi yang mendukungnya, maka manajemen kolektif dipandang sebagai alternatif manajemen yang tepat.

Operasional sistem manajemen kolektif, seluruh tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen/personal. Kepala Sekolah sebagai manajer berkewajiban mengkoordinasikan seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah, seperti merencanakan, pengorganisasian, mengarahkan, dan penilaian seluruh aktivitas sekolah dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah (seperti: Orangtua siswa, komite sekolah, organisasi-organisasi profesional dan lembaga-lembaga sosial masyarakat). Mekanisme manajemen sekolah inklusif ini dapat difisualisasikan melalui gambar berikut.



GAMBAR 17
DIAGRAM MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA
PENDIDIKAN LOKAL DI SD

Lingkup manajemen sekolah yang perlu mendapatkan perhatian khusus sekurang-kurangnya adalah; manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, pembelajaran, manajemen ketenagaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen dana, dan manajemen lingkungan.

H. Pengelolaan Kelas

Pola penempatan peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus di SD inklusif disesuaikan dengan indikator-indikator: (1) Tingkat usia anak; (2) Kadar berat ringannya kelainan anak; (3) Kesiapan kecakapan belajar anak; (4) Kematangan sosial psikologis anak; dan (5) Kecakapan komunikasi anak. Secara rinci pola pengelolaan kelas tersebut adalah sebagai berikut:

berikut:

TABEL 14
POLA PENGELOLAAN KELAS

No	Karakteristik siswa	Penempatan kelas
1.	ABK yang tergolong berat	Kelas khusus penuh, atau Direkomendasikan pada sekolah khusus terdekat, dan pada waktu-waktu tertentu bergabung dengan anak reguler.
2.	ABK yang tergolong sedang	Kelas khusus dan untuk pelajaran tertentu, seperti, kesenian dan olah raga digabungkan dengan anak reguler.
3	ABK yang tergolong sedang tetapi telah memiliki kemampuan komunikasi sosial dan keterampilan	kelas reguler dengan <i>cluster dan pull out</i> (kelompok khusus dalam kelas reguler yang pada waktu-waktu tertentu dibimbing oleh guru khusus di tempat tersendiri)

	edukasi dengan baik.	
4	ABK yang tergolong ringan	kelas reguler dengan <i>pull out</i> (pada waktu-waktu tertentu dibimbing oleh guru khusus di tempat tersendiri)
5	ABK yang tergolong ringan, tetapi telah memiliki kemampuan komunikasi sosial dan keterampilan edukasi dengan baik.	Kelas reguler penuh tanpa bimbingan guru khusus.
6.	ABK yang tergolong memiliki bakat khusus atau memiliki kecerdasan luar biasa	kelas reguler dengan pengayaan atau percepatan

Catatan: Pola penempatan kelas butir 2 s.d 5 tidak bersifat permanen, tetapi sangat tergantung dari perkembangan kecakapan komunikasi sosial dan keterampilan belajar anak.

I. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif adalah kurikulum sekolah dasar reguler yang sedang berlaku dan disesuaikan dengan kekhususan kebutuhan semua peserta didik (kurikulum yang dimodifikasi).

Mengacu pada pendekatan program pembelajaran individual (PPI), maka kurikulum pada sekolah inklusif dikembangkan berdasarkan kompetensi peserta didik secara individual (kurikulum berbasis kompetensi). Sebagai konsekuensi digunakannya pendekatan pembelajaran individual berdasarkan kompetensi peserta didik, maka dalam mendiskripsikan kurikulum yang akan dipergunakan didasarkan pada hasil asesmen yang

akurat agar dapat diketahui potensi dasar dan kompetensi yang harus dikembangkan pada setiap peserta didik.

Unsur-unsur kompetensi siswa yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut: (1) keimanan, nilai, dan pekerti luhur, (2) penguatan integritas nasional, (3) keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, (3) kesamaan memperoleh kesempatan, (4) kemajuan pengetahuan dan teknologi informasi, (5) pengembangan keterampilan hidup, (6) belajar sepanjang hayat, (7) berpusat pada siswa dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif, (8) pendekatan menyeluruh dan kemitraan.

Secara konkrit prosedur pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan program pembelajaran individual, maka alur pengembangannya sebagai berikut: *Pertama*, asesmen untuk mengetahui potensi dasar peserta didik; *Kedua*, mendiskripsikan kompetensi dasar yang perlu dikembangkan pada peserta didik; *Ketiga*, mendiskripsikan lingkup materi setiap bidang studi; *Keempat*, menetapkan topik materi yang akan diajarkan sesuai dengan potensi dan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan diskripsi materi setiap bidang studi.

J. Pengelolaan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang sesuai dengan kemampuan, karakteristik dan kekhususan kebutuhan peserta didik, yang mengacu pada kurikulum yang telah dikembangkan. Agar kegiatan pembelajaran pada SD

inklusif dapat berjalan secara efektif, efisien dan memperoleh hasil yang optimal, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan pembelajaran

Setiap guru pada SD inklusif sangat dimungkinkan membuat lebih dari satu rencana kegiatan pembelajaran, oleh sebab itu format rencana kegiatan pembelajaran perlu disusun sesederhana mungkin, namun tetap mengacu pada prinsip keterpenuhan, keterbacaan secara umum dan kemudahan pengadministrasian/pendokumentasiannya. Aspek-aspek yang perlu dituangkan secara tertulis dalam rencana kegiatan pembelajaran, sekurang-kurangnya memuat tentang: (1) topik pelajaran, (2) tujuan yang akan dicapai, (3) inferensi kemampuan awal peserta didik yang diperoleh dari asesmen yang telah dilakukan sebelumnya atau sekurang-kurangnya merujuk pada hasil evaluasi sebelumnya, (4) strategi pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk tahapan proses pembelajaran, dan (5) strategi evaluasi yang dilengkapi dengan format pencatatan hasil belajar peserta didik.

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran

Hakekat tahapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah penerapan dalam bentuk tindakan atas seperangkat perencanaan pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun dalam kenyataannya tidak semua perencanaan yang telah dibuat guru dapat

dilaksanakan secara mutlak, mungkin hanya sebagian saja yang dapat direalisasikan, atau bahkan pada suatu ketika perencanaan yang sudah dipersiapkan sama sekali tidak dapat dilaksanakan, terutama bagi ABK.

Pada kondisi apapun dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran antara guru dengan peserta didik akan melakukan serangkaian tindakan, yaitu: (1) melakukan komunikasi interpersonal, (2) membuat kesepakatan tentang materi yang akan dipelajari, (3) menentukan target/tujuan yang akan dicapai, (4) menentukan strategi/metode pencapaian target/tujuan yang akan dilakukan, (5) melakukan serangkaian pencapaian target/tujuan dengan menggunakan strategi/metode yang telah disepakati dengan memanfaatkan alat bantu belajar yang sesuai baik yang telah dipersiapkan maupun yang dapat ditemukan pada saat pelaksanaan, (6) melakukan evaluasi terhadap jalannya proses pencapaian target/tujuan dan hasil belajar yang diperoleh, dan (7) mendokumentasikan temuan proses dan hasil belajar.

3. Prinsip-prinsip pembelajaran

Prinsip-prinsip pembelajaran pada sekolah inklusif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus.

Prinsip-prinsip umum

Sistem pembelajaran dalam pendidikan inklusif hakekatnya tidak jauh berbeda dengan sistem pembelajaran pada sekolah reguler, oleh

sebab itu prinsip-prinsip umum dalam pembelajaran juga tidak berbeda, yaitu prinsip motivasi, prinsip konteks, prinsip keterarahan, prinsip hubungan sosial, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip belajar sepanjang hayat, prinsip individualisasi, prinsip menemukan, prinsip pemecahan masalah.

Prinsip-prinsip khusus

Prinsip-prinsip khusus dalam pembelajaran disesuaikan dengan kelaianan dan karakteristik belajar anak, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus, prinsip-prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut: (1) *Tunanetra*, prinsip kekonkritan, pengalaman menyatu, belajar sambil melakukan; (2) *Tunarungu*, prinsip keterarahan wajah, keterarahan suara, keperagaan; (3) *Tunagrahita*, prinsip kasih sayang, keperagaan, habilitasi dan rehabilitasi; (4) *Tunadaksa*, prinsip kasih sayang, habilitasi dan rehabilitasi; (5) *Tunalaras*, prinsip keaktifan, keterarahan, kekeluargaan, kesetiakawanan, kedisiplinan, kasih sayang, dan demokratisasi; (6) *Berbakat/kecerdasan istimewa*, prinsip percepatan dan pengayaan.

K. Sistem Evaluasi dan Kenaikan kelas

1. Sistem evaluasi

Evaluasi dalam pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal dimaksudkan untuk mengukur perkembangan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Aspek yang di evaluasi mencakup ranah kognisi

(pengetahuan), afeksi (sikap) dan psikomotor (tindakan) secara komprehensif, proporsional dan berimbang. Agar evaluasi dapat mencapai sasaran dengan tepat, maka digunakan system evaluasi yang responsif. Rancangan system evaluasi responsive ini, dapat didiskripsikan pada table berikut:

TABEL 15
RANCANGAN SISTEM EVALUASI RESPONSIF

Sasaran	Representasi	Jenis evaluasi	Pelaksanaan
Kognitif	Dokumen perkembangan penguasaan materi pembelajaran peserta didik	Portofolio	Berkelanjutan
	Review penguasaan materi pelajaran	Tes (objektif, esai) Non-tes (wawancara, pengamatan, dan tindakan)	Periodik
Afektif	Dokumen perkembangan sikap (penghayatan /pengamatan) hasil pembelajaran peserta didik	Portofolio	Berkelanjutan
	Review penguasaan (penghayatan /pengamatan) materi pembelajaran	Non-tes (wawancara, pengamatan, dan tindakan)	Periodik
Psikomotor	Dokumen perkembangan keterampilan /pengamatan hasil pembelajaran peserta didik	Portofolio	Berkelanjutan
	Review penguasaan (keterampilan/pengamatan) materi pelajaran	Non-tes (wawancara, pengamatan, dan tindakan)	Periodik

Catatan:

Evaluasi pembelajaran non-akademik bagi ABK diatur secara khusus sesuai dengan karakteristiknya.

2. Sistem kenaikan kelas

Pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal merujuk pada konsep pendekatan humanisasi, pendekatan pendidikan berkelanjutan, pendekatan pendidikan berdasarkan kebutuhan peserta didik, dan program pembelajaran individual, serta pendekatan kompetensi dan budaya pendidikan lokal. Konsep-konsep tersebut mengisyaratkan

bahwa dalam sistem pendidikan inklusif secara akademik tidak hanya terfokus pada target penguasaan materi semata, tetapi aspek optimalisasi pengembangan potensi dan penguasaan kompetensi anak secara utuh sebagai insan individu dan sebagai insan sosial, perlu memperoleh perhatian yang seimbang.

Implikasi dari konsep tersebut di atas dalam sistem kenaikan kelas tidak semata-mata bergantung pada penguasaan materi akademik, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti: (1) Tingkat usia dan pertumbuhan fisik anak; (2) Kecakapan komunikasi sosial; (3) Tingkat perkembangan sosial psikologis; (3) Kesiapan sosial teman sekelasnya.

Artinya sekalipun sekelompok peserta didik itu duduk pada kelas yang sama, sangat dimungkinkan materi pokok bahasan yang dipelajari tidak harus sama. Begitu pula dengan perolehan hasil belajarnya juga tidak sama.

L. Sarana dan Media Pembelajaran

1. Sarana dan prasarana;

Sarana pendidikan yang digunakan pada SD inklusif adalah Sarana pendidikan yang digunakan oleh bentuk satuan pendidikan reguler yang ada ditambah prasarana khusus yang sesuai dengan kebutuhan ABK.

2. Media Pendidikan

Agar pelaksanaan pendidikan di SD inklusif dapat mencapai hasil optimal, disamping media pembelajaran yang sudah ada pada SD reguler perlu dilengkapi dengan media pembelajaran sesuai dengan jenis kelainan, kesulitan, serta keunggulan peserta didik yang dilayani. Jenis sarana pendidikan tersebut di antaranya:

a. Alat bantu pendidikan

Alat bantu bagi anak dengan kebutuhan pendidikan khusus di antaranya: (1) Tunanetra/low vision; kaca mata, teleskop, riglet, huruf Braille, mesin ketik Braille; (2) Tunarungu seperti; alat bantu dengar, alat pengukur tingkat pendengaran, kamus sistem isyarat bahasa Indonesia; (3) Tunagrahita dan berkesulitan belajar; alat bantu belajar mengajar; (4) Tunadaksa, seperti: ramp (lantai landai sebagai pengganti tangga), kursi roda; (5) Berbakat (*gifted and talented*) Berbagai sarana lainnya seperti: buku-buku referensi, alat praktek, laboratorium, dan alat musik yang memadai untuk memenuhi rasa ingin tahu dan minat anak berbakat.

b. Bahan Belajar

Bahan belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah: (1) buku paket dan buku teks lainnya (dalam huruf Braille bagi tunanetra); (2) buku bacaan lainnya (dalam huruf Braille bagi tunanetra); dan (3) bahan belajar khusus sesuai dengan kelainan yang disandang anak.

M. Tenaga Kependidikan Tugas dan Kedudukannya

1. Tenaga Kependidikan dan Tugasnya.

Tenaga Kependidikan dalam pendidikan inklusif terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, tugas-tugas dari masing-masing tenaga kependidikan tersebut adalah sbb.

a. Guru kelas

Guru kelas adalah guru pengajar kelas tertentu pada sekolah dasar sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan. Guru kelas mempunyai tugas sebagai berikut: (1) menciptakan iklim belajar yang kondusif dan promotif sehingga peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus merasa nyaman di kelas atau di sekolah inklusif; (2) melaksanakan proses belajar mengajar untuk semua mata pelajaran di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (kecuali Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Agama), termasuk menilai prestasi belajar peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus; (3) memberikan program remedial atau pengayaan pada anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka; (4) menyusun PPI dan melaksanakannya (bersama-sama guru pendidikan khusus).

- Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran adalah guru yang hanya mengajar mata pelajaran tertentu pada bentuk satuan pendidikan sekolah dasar, sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Guru mata pelajaran mempunyai tugas sebagai berikut: (1) menciptakan iklim belajar yang kondusif dan promotif sehingga peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus merasa nyaman di kelas; (2) bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya; (3) memberikan program remedial atau pengayaan pada anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka; (4) menyusun PPI dan melaksanakannya (bersama-sama Guru Pembimbing).

c. Guru Pendidikan Khusus

Guru Pendidikan Khusus adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus.

Guru Pendidikan Khusus mempunyai tugas sebagai berikut: (1) menciptakan iklim belajar yang kondusif dan promotif sehingga peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus merasa nyaman di kelas; (2) memberi bimbingan langsung kepada anak berkebutuhan khusus, agar ia mampu mengatasi kesulitannya serta agar dapat mengoptimalkan potensinya. Bimbingan dapat diberikan di ruang lain di sekolah itu maupun di luar sekolah; (3). memberikan bantuan kepada guru kelas / guru mata pelajaran / guru bimbingan dan penyuluhan agar dapat memberikan pelayanan pada peserta didik berkebutuhan khusus

yang menjadi tanggung jawabnya; (4). melaksanakan administrasi
murid sesuai dengan bidang tugasnya.



Kedudukan dan pembinaan guru pendidikan khusus.

Guru pendidikan khusus adalah guru yang berlatar belakang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa yang diangkat dan atau ditempatkan dan di salah satu SD reguler di suatu kecamatan. Selanjutnya SD itu disebut sekolah basis. Setiap SD basis sekurang-kurangnya memiliki sejumlah guru khusus sesuai dengan karakteristik kebutuhan anak. Dengan kedudukannya itu atasan langsung yang bertanggung jawab terhadap pembinaan guru pendidikan khusus itu adalah kepala SD basis.

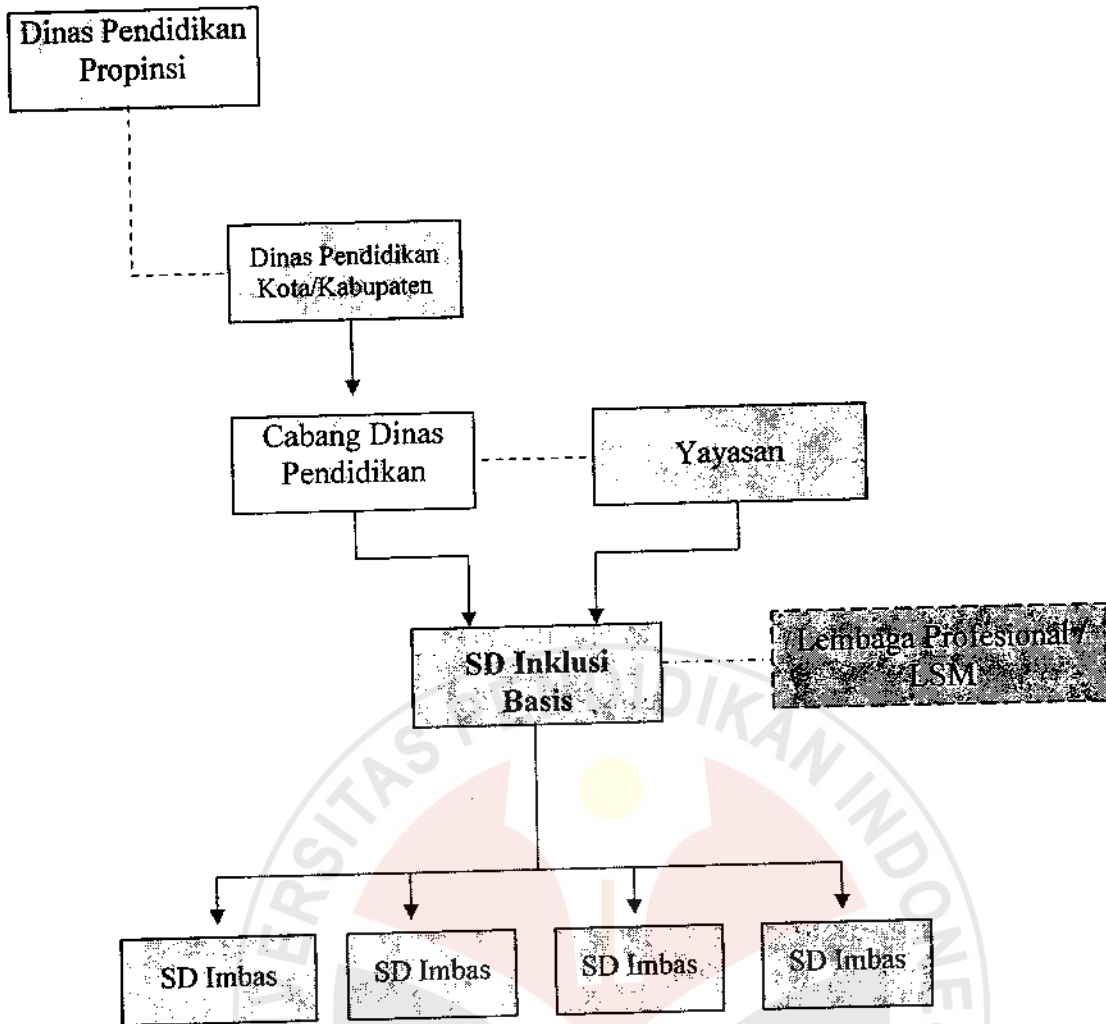
Guru pendidikan khusus disamping bertugas di SD basis, juga dapat melayani beberapa sekolah inklusif disekitarnya, atau diwilayah kecamatannya yang tidak memiliki guru khusus. Sekolah dasar inklusif lainnya yang tidak memiliki guru khusus itu selanjutnya disebut sebagai SD imbas. Kebutuhan guru khusus terhadap sekolah imbas disesuaikan dengan jumlah dan jenis kelainan yang disandang oleh peserta didik. Jenis kelainan/kebutuhan pendidikan khusus dasar yang disandang anak, berkisar tentang gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan komunikasi, gangguan kinestetik dan mobilitas dan gangguan kognitif psikologis.

Sesuai dengan jenis kelainan dasar anak, maka rasio jumlah guru khusus di SD basis sekurang-kurangnya 1 : 3, artinya setiap SD basis sekurang-kurangnya memiliki 3 guru khusus. Berdasarkan rasio ini, maka untuk Kota Surabaya yang memiliki 939 SD negeri maupun swasta, apabila setiap SD basis berkelayakan membina 10 SD imbas, maka dibutuhkan 94 SD basis dan 282 GPK. Selanjutnya apabila diasumsikan di setiap SD imbas itu dibutuhkan 1 GPK, maka untuk SD imbas saja dibutuhkan 845 GPK, dengan demikian total kebutuhan GPK di kota Surabaya adalah 1127 GPK.

N. Struktur Organisasi

Secara organisatoris SD inklusif adalah sekolah dasar reguler, tetapi dalam operasional layanan pendidikannya diperluas, yang menggambarkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap kebutuhan semua anak. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pada sekolah inklusif dibutuhkan guru khusus serta kolaborasi dengan profesional lain.

Guna menjamin kelancaran operasional pengelolaan sekolah inklusif, sesuai dengan karakter kekhususannya, maka rumusan struktur organisasinya sebagai berikut:



GAMBAR 18
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR INKLUSI DENGAN MODEL
SD INTI DAN SD IMBAS

O. Pemberdayaan Masyarakat

Sekolah pada dasarnya merupakan subsistem masyarakat yang bekerja dan bertindak untuk kepentingan masyarakat pula. Sebagai subsistem masyarakat, sekolah senantiasa selalu akan berinteraksi dan bekerja sama dengan subsistem-subsistem masyarakat lainnya untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam konteks interaksi sosial sistem

pendidikan inklusif merupakan tuntutan masyarakat, bukan semata-mata kehendak subsistem masyarakat yang disebut sekolah. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan inklusif hakekatnya adalah suatu bentuk upaya menempatkan posisi masyarakat yang sebenarnya terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan yang inklusif, sehingga admosfir sosial yang inklusif teraktualisasikan dalam bentuk sikap dan tindakan nyata yang lebih luas.

Wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berupa: (1) bantuan dalam perencanaan penyelenggaraan program-program sekolah yang akan dilaksanakan; (2) bantuan dalam pengorganisasian kelembagaan program-program pendidikan; (3) bantuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan; (4) bantuan dalam pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan pendidikan; dan (5) bantuan dalam pengevaluasian penyelenggaraan pendidikan.

Wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara formal yang ada saat ini adalah organisasi sekolah yang disebut "komite sekolah". Tidak menutup kemungkinan organisasi dan lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap pendidikan dapat mengambil bagian dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan SD inklusif.